

BAB IV

ANALISIS / PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena golongan putih (golput) dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar Tahun 2020, dengan fokus pada masyarakat urban yang tinggal di wilayah perkotaan Denpasar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang secara sadar memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Hasil penelitian mengungkap bahwa tindakan golput tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai bentuk apatisisme politik yang pasif, melainkan sebagai respons yang kompleks terhadap berbagai faktor teknis, struktural, maupun psikologis yang memengaruhi perilaku politik warga.

Proses refleksi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku golput masyarakat urban Denpasar mengandung makna politis yang lebih dalam. Warga yang tidak datang ke TPS tidak serta-merta tidak peduli terhadap proses politik, tetapi memiliki pertimbangan rasional yang didasarkan pada pengalaman subjektif serta kondisi sosial yang mereka alami. Misalnya, ada warga yang kecewa terhadap terbatasnya pilihan calon, merasa tidak cukup mendapatkan informasi, atau tidak percaya bahwa pemilu dapat membawa perubahan nyata dalam kehidupan mereka, pada sisi lain ada pula yang berniat untuk menggunakan hak pilihnya, namun terbentur kendala administratif, teknis, dan waktu, seperti tidak terdaftar dalam DPT, tidak mendapatkan undangan memilih, atau kesulitan mengakses lokasi TPS karena alasan pekerjaan.

Berbagai hambatan tersebut semakin kompleks karena pelaksanaan Pilwali Denpasar 2020 bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, masyarakat mengalami pembatasan aktivitas melalui kebijakan PSBB dan PPKM, serta penerapan protokol kesehatan yang ketat di TPS. Walaupun penyelenggara pemilu telah berupaya untuk menyesuaikan sistem penyelenggaraan pemilu dengan standar kesehatan, rasa khawatir terhadap penularan virus tetap menjadi faktor signifikan yang mengurangi motivasi pemilih untuk hadir di TPS. Keputusan tidak memilih dalam konteks ini tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan atas risiko kesehatan dan keselamatan pribadi maupun keluarga.

Refleksi penelitian ini juga mencerminkan bahwa budaya politik masyarakat urban Kota Denpasar bersifat majemuk dan dinamis. Tidak semua masyarakat berada dalam satu kategori budaya politik tertentu. Sebagian menunjukkan karakteristik budaya politik parokial, yakni keterputusan dari sistem politik, minimnya kepercayaan terhadap lembaga negara, serta tidak merasa terlibat atau diikutsertakan dalam proses politik. Namun, pada saat yang sama, terdapat pula ekspresi budaya politik partisipan, yang tercermin dari kepedulian terhadap isu-isu politik, kesadaran atas pentingnya hak pilih, dan ekspektasi terhadap kualitas pemimpin.

Dalam hal ini, ditemukan adanya bentuk budaya politik campuran, yaitu perpaduan antara parokialisme dan partisipasi. Masyarakat urban Denpasar menunjukkan keberagaman orientasi politik sebagai akibat dari interaksi antara kondisi sosial, pengalaman individu, serta persepsi terhadap sistem politik yang ada. Sebagian besar informan menyadari pentingnya pemilu, tetapi merasa bahwa

sistem tidak responsif terhadap aspirasi mereka. Oleh karena itu, tindakan golput dalam konteks ini merupakan bentuk artikulasi ketidakpuasan atau keterasingan, bukan sekadar ketidakpedulian.

Selama proses penelitian, peneliti menghadapi sejumlah kendala yang perlu dicatat sebagai refleksi metodologis. Keterbatasan dalam mengakses informan secara langsung akibat pembatasan sosial dan protokol kesehatan. Hal ini menuntut penyesuaian dalam teknik komunikasi dan observasi. Meskipun demikian, pendekatan humanistik dan keterbukaan terhadap narasi informan berhasil menggali dimensi subjektif yang penting untuk dianalisis. Peneliti juga menyadari bahwa keberhasilan pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh sensitivitas sosial dan kemampuan membangun kepercayaan dengan informan.

Temuan ini memperkuat pentingnya memahami konteks lokal dan keragaman sosial dalam studi perilaku politik. Tidak ada satu model perilaku pemilih yang dapat mewakili seluruh masyarakat urban. Dalam realitas sosial yang kompleks seperti Kota Denpasar, pemilih membawa latar belakang, pengalaman, dan rasionalitasnya masing-masing. Oleh karena itu, strategi peningkatan partisipasi politik tidak dapat bersifat seragam dan generik, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan persepsi masyarakat yang berbeda-beda.

Penelitian ini memberikan kontribusi akademik yang penting dalam beberapa dimensi, baik secara teoritis, metodologis, maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori budaya politik yang dikemukakan oleh Almond dan Verba dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dalam masyarakat urban yang kompleks dan heterogen, seperti di Kota Denpasar, tidak mungkin ditemukan budaya politik yang homogen. Sebaliknya, budaya politik berkembang dalam bentuk campuran, di mana unsur-unsur parokial dan partisipan dapat hidup berdampingan dalam satu wilayah dan bahkan dalam individu yang sama.

Teori budaya politik yang selama ini cenderung digunakan dalam studi-studi makro tentang sistem politik negara, dalam penelitian ini berhasil diadaptasi untuk memahami dinamika perilaku politik di tingkat lokal. Penelitian ini menunjukkan bahwa kategori-kategori budaya politik tidak bersifat kaku, melainkan bersifat dinamis dan kontekstual. Pemilih tidak dapat secara tetap dikategorikan ke dalam satu tipe budaya politik, karena orientasi mereka dapat berubah seiring waktu dan dipengaruhi oleh konteks sosial serta peristiwa politik tertentu.

Secara metodologis, penelitian ini memperlihatkan bahwa pendekatan kualitatif, khususnya teknik wawancara mendalam, sangat efektif dalam menggali dimensi subjektif dan reflektif dari perilaku politik masyarakat. Melalui narasi informan, peneliti dapat menangkap alasan-alasan yang tidak tampak dalam survei kuantitatif, seperti rasa kecewa, keterasingan, atau keraguan terhadap sistem politik. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa pemahaman perilaku politik tidak cukup hanya melalui angka partisipasi, tetapi memerlukan pemahaman terhadap makna dan motivasi di balik keputusan politik warga.

Sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi lembaga penyelenggara pemilu, seperti penyelenggara pemilu dalam merancang strategi

peningkatan partisipasi politik yang lebih kontekstual. Misalnya, dengan memperkuat sosialisasi pemilu melalui pendekatan yang lebih personal, menjangkau segmen masyarakat yang rentan secara informasi, serta menyederhanakan prosedur administratif yang selama ini menjadi kendala teknis bagi pemilih. Dalam jangka panjang, penguatan literasi politik masyarakat perlu menjadi prioritas, agar warga tidak hanya memahami hak pilihnya, tetapi juga memiliki kapasitas kritis untuk menilai dan memilih calon pemimpin.

Penelitian ini juga membuka ruang bagi studi lanjutan yang lebih mendalam mengenai pengaruh faktor-faktor sosial seperti status ekonomi, tingkat pendidikan, latar belakang budaya, dan mobilitas geografis terhadap partisipasi politik. Penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku golput di kota-kota besar tidak bisa dilepaskan dari pola kehidupan masyarakat urban yang kompleks, yang ditandai oleh mobilitas tinggi, tekanan ekonomi, dan keterasingan dari struktur politik formal. Oleh karena itu, kajian-kajian akademik ke depan dapat memperluas pendekatan interdisipliner dengan melibatkan sosiologi, psikologi sosial, dan studi komunikasi politik.

Kontribusi akademik lainnya adalah dalam konteks pengembangan demokrasi lokal. Studi ini menyoroti pentingnya membangun kepercayaan antara warga dan institusi politik. Tanpa kepercayaan, partisipasi politik bersifat instrumental, sementara keterlibatan warga yang bermakna memerlukan relasi yang bersifat substantif. Oleh karena itu, pembangunan demokrasi tidak cukup hanya dengan penyelenggaraan pemilu yang prosedural, tetapi juga harus diiringi dengan upaya memperkuat relasi sosial-politik antara pemerintah dan rakyat.

Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya pemahaman akademik mengenai realitas politik lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks masyarakat urban. Penelitian ini tidak hanya memotret perilaku golput sebagai fenomena statistik, tetapi menjelaskan dimensi sosiologis dan psikologis di baliknya. Dengan demikian, kajian ini menjadi salah satu upaya untuk menjembatani dunia akademik dengan realitas empiris yang berkembang di tengah masyarakat.

Sebagai tambahan, refleksi terhadap data lapangan juga memperlihatkan bagaimana pandemi COVID-19 telah mengakselerasi transformasi budaya politik warga kota. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam menyerap informasi politik karena overload informasi, termasuk hoaks dan disinformasi yang beredar di media sosial. Hal ini turut menambah lapisan keraguan masyarakat terhadap integritas proses pemilu. Situasi ini memberikan pelajaran penting bahwa literasi digital dan politik menjadi kebutuhan yang semakin mendesak untuk dikuatkan, terutama dalam konteks pemilu yang semakin terdigitalisasi.

Salah satu catatan penting dari refleksi ini adalah adanya ketimpangan akses informasi politik antara warga yang aktif secara digital dan mereka yang terbatas akses terhadap teknologi. Kelompok masyarakat urban yang bekerja di sektor informal, berpendidikan rendah, atau berasal dari luar daerah cenderung tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai tata cara pemilu, calon yang bertarung, maupun urgensi dari keterlibatan mereka dalam proses demokrasi lokal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak strategi komunikasi politik yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman sosial.

Lebih lanjut, refleksi ini juga menunjukkan bahwa walaupun pemilu dilaksanakan secara serentak dan prosedural, pengalaman warga terhadap proses demokrasi tersebut sangat bervariasi. Beberapa informan menunjukkan bahwa mereka ingin berpartisipasi, tetapi tidak memiliki waktu karena harus bekerja demi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, informan lainnya menyatakan kekecewaan terhadap rendahnya kualitas sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Realitas ini memperkuat temuan bahwa pelibatan warga tidak cukup hanya melalui pemberian informasi, melainkan juga melalui pendekatan relasional dan keterlibatan aktif.

Kontribusi lain dari penelitian ini adalah menegaskan pentingnya pemahaman terhadap perilaku golput sebagai refleksi dari kondisi demokrasi secara keseluruhan. Jika golput dianggap sebagai indikator rendahnya legitimasi proses politik, maka perlu ada upaya menyeluruh untuk membangun kembali kepercayaan publik. Hal ini meliputi reformasi institusi penyelenggara pemilu, peningkatan akuntabilitas kandidat dan partai, serta jaminan bahwa pemilu membawa dampak nyata bagi kehidupan warga. Dalam konteks ini, golput menjadi cermin yang memperlihatkan celah dalam sistem demokrasi yang perlu dibenahi.

Kontribusi akademik penelitian ini semakin kuat dengan adanya potensi pengembangan model pendekatan baru dalam memahami budaya politik urban. Model ini menekankan pentingnya dimensi kontekstual seperti faktor ekonomi, struktur kerja, serta dinamika sosial kota dalam membentuk preferensi politik masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memperkaya diskusi dalam studi-studi

ilmu politik mengenai penguatan demokrasi lokal di tengah masyarakat yang mengalami tekanan hidup tinggi, seperti di kota-kota besar.

Berdasarkan dari sudut pandang kebijakan, hasil penelitian ini bisa dijadikan pijakan dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap aspirasi warga. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil studi ini untuk memperkuat program-program partisipasi warga yang tidak hanya bersifat seremoni, tetapi juga substantif, seperti forum musyawarah warga, pemberdayaan komunitas, serta penyediaan media komunikasi dua arah antara warga dan penyelenggara pemilu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan angka partisipasi, tetapi juga kualitas demokrasi itu sendiri.

Akhirnya, refleksi dari penelitian ini juga memberikan pelajaran berharga bagi akademisi, praktisi, dan penyelenggara pemilu bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa dibangun hanya dengan prosedur yang benar. Dibutuhkan ekosistem sosial-politik yang mendorong warga untuk merasa memiliki proses politik. Dengan menempatkan warga sebagai subjek utama demokrasi, bukan sekadar objek pemilu, maka partisipasi politik dapat ditumbuhkan secara alami dan berkelanjutan.